

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Ira dan Nur Azlina. 2014. “Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan)”. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi 1.1 : 1-15, Universitas Riau, Pekanbaru.*
- Aziz, M.A.A., Rahman, H.A., Alam, M.M., dan Said, J. 2015. Enhancement of the accountability of public sectors through integrity system, internal control system and leadership practices: A review study. *International journal of Procedia Economics and Finance 163-169.*
- Badan Kepegawaian Negara (BKN). 2003. Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil. Jakarta
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2008. Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Chici Claraini. 2017. “Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir)”. *Jurnal. JOM Fekon, Vol 4, No 1. April 2017.*
- Efendy, Dedy, Syamsidar, AR, Mulyadi. 2018. “Pengaruh Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh)”. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan, Vol 2, No 2, ISSN: 2549-3477, e-ISSN: 2623-1077. September 2018.*
- Fadli, Cholis, Nur. 2018. “Pengendalian Intern Pemerintah dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Bengkulu”. *Jurnal Akuntansi, Vol 8, No 3, Hal 145-154, e-ISSN 2303-0356. Oktober 2018*
- Fathia, Nurul. 2017. “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Study Kasus SKPD di Provinsi Riau)”. *Jurnal. JOM Fekon, Vol 4, No 1. Februari 2017.*
- FCGI (*Forum For Corporate In Indonesia*) 2002. *Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) The Essence Of Good Corporate Governance. Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia.* Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & Synergy Communication. Jakarta
- Halim, A. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN

- Hevesi, G. Alan. 2005. *Standards for Internal Control in New York State Government*. Jakarta
- Hullah, Abdurahman Rigel. 2012. “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintahan Sulawesi Utara”. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 3. No 2. Hal. 9-21.
- Hutapea, P & Thoha, N. (2008). *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Lupiyoadi, Rambat & Ikhsan, Ridho Bramulya. (2015). *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mawikere, Lidia, Morasa, Jenny, Lumeta, Agnestasia Laura. 2016. “Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan)”. *Jurnal EMBA ; Vol 4, No 3, ISSN 2303-1174*.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawar, Gugus Irianto, dan Nurkholis. 2006. “Pengaruh Karakteristik Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang”. *Simposium Nasional Akuntansi 9. K-ASPP 02. Padang*
- Putri, Engrinaen Mauliziska Nugraheni. 2015. “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”. *Jurnal. JOM Fekon, Vol 2, No 2. Oktober 2015*.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP). 2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Diklat Pembentukan Auditor Ahli. Edisi Kelima. 2007
- Riswantika, Mia. 2019. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Sragen”. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- Rofika dan Ardianto. (2014). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi*, Vol.2 No.2, 197-209, ISSN: 2337-4314.

Rusmalolas, Risal. 2018. “Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhartono, Ehrmann dan Mochammad Solichin. 2006. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi”. *Simposium Nasional Akuntansi 9. Padang*, 23-26.

Wahyuni, Made Arie, Diatmika, Putu Gede, Indrayani, Luh Febr. 2017. “Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Publik (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyare)”. *Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI ; Vol 8, No 2. Tahun 2017*.

Yahya, M. Rizal, Nurina. 2016. “Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol 1, No 2, e-ISSN: 2581-1002.

#### **Peraturan Pemerintah:**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010–2025.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.